

Analysis of the Potential of Regional Taxes on Regional Original Revenue (PAD) of East Lombok Regency for 2017-2021

Analisis Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017-2021

Lisanul Qariah^{*1}, Hadi Mahmudi², Siti Fatimah²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Article Info

Submitted:

01/04/2023

Accepted:

02/04/2023

Approved:

15/04/2023

Published:

04/05/2023.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan sumber data yang berasal dari Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Timur. Teknik Analisis data yang digunakan adalah matriks potensi (*Analisis Overlay*). Hasil Penelitian pertumbuhan dan kontribusi dengan analisis matriks potensi (*Analisis Overlay*) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 – 2021 menunjukkan bahwa pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) termasuk kedalam kategori prima, hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan yang positif dan kontribusi yang tinggi. Sedangkan Pajak Reklamasi, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet termasuk kedalam kategori berkembang dikarenakan pertumbuhan yang positif dan kontribusi yang rendah. Pajak yang masuk kedalam kategori terbelakang adalah Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang negatif dan kontribusi yang rendah.

Kata Kunci: Kontribusi, Matriks Potensi (*Analisis Overlay*), Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Potensi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential and contribution of local taxes to East Lombok Regency's Original Revenue (PAD) in 2017-2021. The method used in this study is a quantitative method with data sources originating from the Regional Breasfeeding Revenue Agency (BAPENDA) of East Lombok Regency. The data analysis technique used is the potential matrix (Overlay Analysis). The results of research on growth and contribution with potential matrix analysis (Overlay Analysis) in East Lombok Regency for 2017 – 2021 show that Restaurant Tax, Street Lighting Tax, Non-Metal and Rock Mineral Tax (MBLB), Rural and Urban Land and Building Tax (PBBP2), and the Land and Building Rights Acquisition Fee Tax (BPHTB) is included in the prime category, this is due to the positive growth rate and high contribution. While the Reklamasi Tax, Parking Tax, Underground Water Tax, and Swallow's Nest Tax are included in the developing category due to positive growth and low contribution. Taxes that fall into the underdeveloped category are hotel taxes and entertainment taxes, this is due to negative growth and low contributions.

Keywords: Contribution, Potential Matrix (*Overlay Analysis*), Local Taxes, Local Revenue (PAD), Potential.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan dalam mencapai kemandirian daerah. Suhendi (2007) berpendapat bahwa Semakin tinggi peranan

PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha - usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan.

* Correspondence Address

E-mail: lisanulqariah55@gmail.com

Eko Aprianto (2017), menyatakan semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan daerahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Begitupun sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah menurun, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kontribusi PAD secara optimal sehingga pembangunan di daerah dapat terealisasi.

Setiap jenis dari PAD tersebut mempunyai porsi dalam menyumbang penerimaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Salah satu penyumbang terbesar adalah pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2004), Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu kurangnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparat, kekhawatiran akan kegagalan birokrasi dalam menjalankan program serta kurangnya optimisme dalam menggapai hasil

yang akan dicapai. Hal ini akan berakibat pada pendapatan atau penerimaan yang akan diterima oleh pemerintah. Disisilain, bencana wabah pandemi covid pada tahun 2020 tentunya membawa dampak yang cukup besar dalam pengalokasian anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah, dimana anggaran pada saat itu difokuskan untuk penanganan wabah covid 19. Hal ini tentunya berpengaruh juga terhadap penerimaan pajak yang mengalami penurunan. Salah satunya diprovinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten di bawahnya.

Dari setiap daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat dalam pengalokasian anggaran daerah pada tahun 2020 difokuskan untuk penanganan wabah covid 19, salah satunya di kabupaten Lombok Timur.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 1.369.917 jiwa pada tahun 2021. Selain itu, Kabupaten Lombok Timur memiliki beberapa potensi dalam sumber daya alamnya yaitu dalam pertanian, kelautan, industri energy, perdagangan, transportasi, perdagangan, dan pariwisata.

Dengan adanya potensi-potensi tersebut akan sangat menguntungkan bila pemerintah bisa mengoptimalkannya dengan baik, sehingga diharapkan kontribusi pajak daerah yang akan disumbangkan ke Pendapatan Asli daerah (PAD) akan besar dan dapat memacu pertumbuhan dan Pembangunan di wilayah Lombok Timur. Hal ini tidak terlepas dari peran pajak daerah dalam menyumbangkan penerimaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur. Berikut adalah realisasi dan target penerimaan pajak daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 - 2021.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	56.463.655.535,00	61.012.190.503,00
2018	61.322.344.080,00	60.559.105.680,70
2019	66.732.099.935,00	63.324.866.569,00
2020	72.658.793.458,00	52.992.553.585,00
2021	88.751.947.953,00	62.945.939.175,00

Berdasarkan tabel 1 diatas, menggambarkan realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok

Timur Tahun 2017-2021. Tabel tersebut menunjukkan terjadinya fluktuasi (naik turun) realisasi pajak daerah setiap tahunnya.

Dimana pada tahun 2017 memiliki kontribusi Rp. 61.012.190.503,00, sedangkan pada tahun 2018 pendapatan pajak daerah turun menjadi Rp. 60.559.105.680,70, hal ini disebabkan oleh bencana gempa bumi Lombok. Pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 63.324.866.569,00, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat dari pengaruh pandemic covid 19 yaitu sebesar Rp. 52.992.553.585,00, dan kembali naik pada tahun 2021 yaitu sebesar 62.945.939.175,00. Untuk tahun 2017 realisasi penerimaan melebihi target dan ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah bagus dalam mengelola penerimaan sector pajak, akan tetapi dari tahun 2018-2021, realisasi pajak daerah tidak melebihi target.

Dalam menetapkan target perlu dilakukan perhitungan potensi. Akan tetapi penentuan potensi biasanya berdasarkan pada target tahun anggaran sebelumnya, hal ini sejalan dengan pendapat dari Nastiti dkk (2009), yang menyatakan bahwa kecenderungan pemerintah daerah dalam menetapkan target pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan tahun sebelumnya, dan terkadang para kepala daerah lebih senang mencari dana yang berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dibandingkan dengan menggali potensi pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap pemerintah pusat yang terlihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah menandakan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya. Bahkan hal ini juga membuktikan optimalisasi usaha pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga perlu dilakukan penggalan lebih dalam terkait dengan pajak daerah yang potensial sehingga dapat upayakan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur tepatnya di BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan data deret berkala (time series) selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Data yang digunakan adalah realisasi penerimaan yang diperoleh dari setiap jenis – jenis pajak daerah kabupaten Lombok Timur tahun 2017-2021.

Teknik Analisis Data

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kontribusi

Menurut Handoko (2013), Analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2. Analisis Laju Pertumbuhan

Halim (2004:163), menyatakan bahwa Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pajak di tahun berikutnya.

Rumus laju pertumbuhan pajak daerah sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

3. Analisis Matriks Potensi (Analisis Overlay)

Dalam menganalisis potensi pajak daerah, peneliti menggunakan analisis matriks potensi (*analisis Overlay*). Teknik analisis overlay merupakan analisis data yang menggabungkan dua atau lebih data informasi yang dapat menghasilkan informasi baru.

Sebelum melakukan analisis matriks potensi (*Analisis Overlay*), langkah atau tahapan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menghitung kontribusi pajak daerah tahun 2017 – 2021 dan menyesuakannya dengan kriteria yang telah ditentukan.
2. Menghitung laju pertumbuhan pajak daerah tahun 2017 – 2021 dan

menentukan kriteria dari hasil perhitungannya.

3. Melakukan analisis matriks Potensi (*Analisis Overlay*)

Tujuan menggunakan matriks potensi (*Analisis Overlay*) yaitu untuk menentukan pajak daerah dalam kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang. Adapun tabel matriks potensi pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 2 Matriks Potensi Pajak Daerah

Laju Pertumbuhan	Kontribusi	
	$zXi \geq 1$ (tinggi)	$zXi < 1$ (rendah)
$zXi \geq 1$ (Positif)	Prima	Berkembang
$zXi < 1$ (Negatif)	Potensial	Tebelakang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi

Tabel 3 Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2017 -- 2021

Jenis Pajak	Tahun					Rata-Rata	Keterangan
	2017	2018	2019	2020	2021		
Pajak Hotel	0,408	0,316	0,297	0,087	0,075	0,237	Rendah
Pajak Restoran	1,557	1,531	1,739	2,217	1,17	1,643	Tinggi
Pajak Hiburan	0,027	0,024	0,017	0,010	0,011	0,018	Rendah
Pajak Reklame	1,06	0,959	0,848	0,767	0,763	0,879	Rendah
Pajak Penerangan Jalan	9,21	8,87	8,655	6,770	6,534	8,008	Tinggi
Pajak Parkir	0,017	0,017	0,018	0,009	0,01	0,014	Rendah
Pajak Air Bawah Tanah	0,009	0,008	0,011	0,011	0,045	0,017	Rendah
Pajak Sarang Burung Walet	0,015	0,016	0,008	0,003	0,002	0,009	Rendah
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	7,174	5,188	5,075	2,769	3,131	4,667	Tinggi
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3,973	3,807	3,77	3,211	2,636	3,479	Tinggi
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2,832	2,372	1,38	1,296	1,894	1,955	Tinggi

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa rata - rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan hasil perhitungan, pajak restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sangat berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),

dimana kontribusi dari pajak - pajak daerah tersebut berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Lombok Timur, optimal dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

Karena rata - rata kontribusi untuk pajak daerah tersebut >1 maka dimasukkan kedalam kategori tinggi, seperti pajak restoran sebesar 1,6428%, kemudian Pajak Penerangan Jalan sebesar 8,0078%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

sebesar 4,6674%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 3,4794%, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 1,9548%. Sedangkan untuk pajak Pajak Hotel, pajak hiburan, Pajak Reklame, pajak paker, Pajak Air Bawah Tanah, dan pajak burung walet kurang berpotensi, hal ini dikarenakan hasil rata-rata kontribusi dari pajak – pajak

tersebut berada <1 yang menunjukkan kategori redah. Kategori tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah belum optimal dalam melakukan pemungutan pajak, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak.

Analisis Laju Pertumbuhan

Tabel 4 Rekapitulasi Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2017-2021

Jenis pajak daerah	Laju pertumbuhan (%)					Rata - Rata	Keterangan
	2017	2018	2019	2020	2021		
Pajak hotel	10,684	-12,571	4,348	-66,797	1,194	-12,628	Negatif
Pajak restoran	32,382	10,999	25,843	-20,92	13,388	12,138	Positif
Pajak hiburan	50,096	0,229	-20,582	-34,289	0,268	-0,855	Negatif
Pajak reklame	37,396	2,176	-2,11	2,269	17,336	11,413	Positif
Pajak penerapan jalan	27,381	8,722	8,077	-11,587	13,797	9,278	Positif
Pajak parkir	-	15356	15,102	-40,398	21,894	2,988	Positif
Pajak air tanah	92,483	-4,145	47,924	19,655	362,3	103,643	Positif
Pajak sarang burung walet	-	22,614	-49,143	-58,542	-1,648	-21,68	Negatif
Pajak mineral	16,612	-18,367	8,356	-38,32	33,28	0,321	Positif
Pajak bumi dan bangunan	16,279	8,178	9,696	-3,749	-3,19	5,443	Positif
Pajak bea cukai	77,6	-5,454	-35,537	6,167	72,266	23,008	Positif
Rata-rata laju pertumbuhan						12,096	

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2017 – 2021 memiliki rata – rata 12,096%. Terdapat tujuh pajak berada dalam kategori positif yaitu Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parker, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Pajak

Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Sarang Burung Walet berada dalam kategori negatif, hal ini disebabkan perkembangan laju pertumbuhan pajak setiap tahunnya mengalami fluktuasi (naik turun).

Analisis Matriks Potensi (*Analisis Overlay*)

Tabel 5 Matriks Potensi (*Analisis Overlay*) Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 - 2021

Nama Pajak Daerah	Kontribusi	Laju Pertumbuhan	Kategori
Pajak Hotel	Negatif	Rendah	Terbelakang
Pajak Restoran	Positif	Tinggi	Prima
Pajak Hiburan	Negatif	Rendah	Terbelakang
Pajak Reklame	Positif	Rendah	Berkembang
Pajak Penerangan Jalan	Positif	Tinggi	Prima
Pajak Parkir	Positif	Rendah	Berkembang
Pajak Air Bawah Tanah	Positif	Rendah	Berkembang
Pajak Sarang Burung Walet	Positif	Rendah	Berkembang

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Positif	Tinggi	Prima
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Positif	Tinggi	Prima
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Positif	Tinggi	Prima

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat lima pajak daerah masuk ke dalam kategori prima, yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Lombok Timur sudah sangat baik dalam mengelola pajak daerah, selain itu kelima pajak daerah tersebut merupakan sektor andalan bagi kabupaten Lombok Timur yang disebabkan oleh tingkat pertumbuhan pajak daerah yang positif dan kontribusi yang tinggi.

Berdasarkan analisis empat pajak daerah berada dalam kategori berkembang yaitu Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Kategori berkembang pada keempat objek pajak tersebut tidak menjadi sektor andalan bagi pemerintah Kabupaten Lombok Timur hal ini dikarenakan laju pertumbuhan yang positif akan tetapi kontribusi pajak rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dan peningkatan agar kontribusi pajak daerah tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pajak daerah dapat berada dalam kategori prima dan menjadi sektor andalan bagi penerimaan kabupaten Lombok Timur. Sedangkan pajak daerah yang berada dalam kategori terbelakang adaah pajak hotel dan pajak restoran, hal ini disebabkan oleh kontribusi pajak yang negatif dan laju pertumbuhan yang rendah.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Hasil penelitian dengan menggunakan Matriks Potensi (*Analisis Overlay*), menunjukkan bahwa lima pajak daerah termasuk ke dalam kategori prima yaitu Pajak Restoran, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak daerah yang masuk kedalam kategori berkembang yaitu Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Untuk Pajak yang masuk ke dalam kategori terbelakang adalah Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. (2)

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2017 - 2021 secara keseluruhan masuk kedalam kriteria sedang, dan bahkan dua tahun terakhir masuk kedalam kriteria kurang. Jika diratakan untuk kontribusi dari setiap jenis pajak daerah selama lima tahun terakhir, hanya pajak restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) masuk ke dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet masuk ke dalam kategori rendah. Oleh karena itu peran Pemerintah sangat diperlukan agar kedepannya kontribusi untuk masing - masing jenis pajak daerah tinggi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.

Deklarasi penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

Kepentingan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

REFERENSI

- Aprianto, Eko. 2017. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Potensi Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. skripsi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung*.
- Handoko P, Sri. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah*, Vol. 1 No. 1. 2013.
- Haning, A., Radianto. Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Aset Akuntansi dan Keuangan*. Vol 1 No. 1 Februari 2015.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Suhendi, Eno. 2007. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta (Tahun 1991 - 2005). Skripsi. UII. Yogyakarta